

**PROTES SOSIAL DI KAPAL PERANG:  
Pemberontakan Marinir Bumiputera di Kapal De Zeven Provincien 1933**

**Danil Mahmud Chaniago**

Fakultas Adab dan Humaniora UIN Imam Bonjol Padang

*email: arsipku09@yahoo.co.id*

**Umi Rusmiani Umairah**

Fakultas Adab dan Humaniora UIN Imam Bonjol Padang

*email: kabarumi@gmail.com*

**Abstract**

In the early 1930s the world community was hit by a very severe economic crisis. History records this period as the Maleise Age, namely the dramatic decline in the economic level of the world community. However, at this time precisely the Indonesian independence movement could increase its resistance to the Dutch East Indies government. This very precarious situation prompted de Jonge, the Governor-General, to save government spending and tightly restrict the national movement of the bumiputera (read: Indonesia). Not a few movement figures were later arrested and exiled without going through a court process.

In turn, this economic and social crunch pushed the earth's marines on the battleship De Zeven Provincien to carry out a rebellion while singing the song Indonesia Raya. The government's injustice in terms of salary reduction is the main trigger for the emergence of social protest. The government discretion is seen by the maritime marines as an act of harassing their national values. Although this rebellion can be overcome, however, this event shows the high spirit of unity among the marines of the Bumiputera. This spirit is a reflection of the rise of national consciousness of the bumiputera, especially among marines.

**Keywords:** Social Protests, Battleships, Bumiputera Marine Marines, De Zeven Provincien Ships

**Abstrak**

*Awal tahun 1930-an masyarakat dunia dilanda krisis ekonomi yang sangat parah. Sejarah mencatat masa ini sebagai Zaman Maleise yakni menurunnya tingkat ekonomi masyarakat dunia secara dramatis. Akan tetapi, pada masa ini justru kaum pergerakan kemerdekaan Indonesia dapat meningkatkan perlawanannya terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Situasi yang amat genting ini mendorong de Jonge Gubernur Jenderal melakukan penghemat belanja pemerintah dan mengekang secara ketat pergerakan kebangsaan kaum bumiputera (baca: Indonesia). Tidak sedikit tokoh-tokoh pergerakan yang kemudian ditangkap dan diasingkan tanpa melalui proses pengadilan.*

*Pada gilirannya, kegentingan ekonomi dan sosial ini mendorong marinir-marinir bumi putera di Kapal Perang De Zeven Provincien melakukan pemberontakan sambil mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Ketidakadilan pemerintah dalam hal pengurangan gaji merupakan pemicu utama munculnya protes sosial itu. Diskrepansi pemerintah dipandang marinir-marinir bumiputera sebagai tindakan yang melecehkan*

nilai-nilai kebangsaan mereka. Meskipun pemberontakan ini dapat diatasi namun bagaimanapun juga peristiwa ini menunjukkan tingginya semangat persatuan di kalangan marinir bumiputera. Semangat ini merupakan cerminan bangkitnya kesadaran kebangsaan kaum bumiputera, khususnya di kalangan marinir.

Kata Kunci: Protes Sosial, Kapal Perang, Pemberontakan Marinir Bumiputera, Kapal *De Zeven Provinciën*

## PENDAHULUAN

Sejarah dunia mencatat, bahwa jelang akhir tahun 1920-an masyarakat dunia dilanda krisis ekonomi yang sangat dramatis. Krisis ini berawal dari melorotnya Bursa Saham New York pada tanggal 24 Oktober 1929 dan mencapai puncaknya lima hari setelahnya. Depresi ekonomi ini tidak hanya menimpa negara-negara industri melainkan juga dirasakan oleh negara-negara berkembang. Intinya, krisis ekonomi ini telah memporandakan perekonomian kota-kota besar di seluruh dunia terutama yang pendapatannya sangat bergantung pada industri berat. Krisis ini juga memukul perekonomian pedesaan yang sangat bergantung pada sektor pertanian lantaran harga produk sektor ini mengalami penurunan secara drastis.

Depresi ekonomi yang meresahkan masyarakat dunia ini berefek pada memburuknya perekonomian masyarakat Hindia Belanda. Pabrik-pabrik yang terdapat di kota-kota besar banyak yang tutup sehingga menimbulkan pengangguran yang hebat. Maraknya pengangguran berakibat jutaan orang meninggal dunia. Masyarakat desa pun merasakan dampak depresi ekonomi ini. Betapapun kerasnya pekerjaan yang mereka jalani ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup. Dalam situasi seperti ini semangat kesadaran nasional kaum bumiputera tumbuh dan berkembang hingga ke pelosok nusantara. Dalam waktu yang bersamaan, terjadi peralihan kekuasaan di pemerintah Hindia

Belanda. Gubernur Jenderal de Graeff yang dikenal sebagai pemimpin paternalistik dan liberal digantikan oleh *de Jonge* yang konservatif.

Tidak lama setelah penobatannya sebagai penguasa Hindia Belanda *de Jonge* mengeluarkan kebijakan yang mengekang secara ketat pergerakan politik kebangsaan kaum bumiputera. Iklim politik kebangsaan kaum bumiputera berubah drastis. Kebebasan berpolitik yang sebelumnya dirasakan kaum bumiputera mulai dihambat. Tidak sedikit tokoh-tokoh pergerakan yang dilarang berpidato bahkan banyak di antar tokoh itu yang kemudian ditangkap dan diasingkan agar tidak dapat berhubungan dengan pengikutnya. Pemerintah kolonial Hindia Belanda di bawah komando *de Jonge* memiliki hak-hak luar biasa. Senjata inilah yang digunakan *de Jonge* untuk menghambat lajunya kesadaran kebangsaan kaum bumiputera.

Kebijakan *de Jonge* lainnya adalah melakukan pengetatan anggaran belanja negara di seluruh instansi pemerintah. Dari sekian banyak penghematan itu, penurunan gaji marinir mempunyai tempat tersendiri dalam sejarah bangkitnya kesadaran kebangsaan Indonesia. Sebab, penurunan gaji itu berakibat timbulnya pemberontakan para marinir bumiputera (baca: Indonesia) di atas kapal perang milik Angkatan Laut Pemerintah Hindia Belanda, *De Zeven Provinciën*. Tulisan ini akan mencoba merekonstruksi kembali peristiwa pemberontakan itu dan bagaimana pemerintah kolonial Hindia Belanda menyikapinya?

## METODE PENELITIAN

Langkah pertama untuk menghasilkan tulisan ini adalah mengumpulkan sumber-sumber sejarah dalam bentuk tertulis. Selain memanfaatkan koleksi pribadi pengumpulan sumber ini juga dilakukan pada perpustakaan Fakultas Adab dan Humaniora UIN Imam Bonjol Padang. Sumber yang terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan topiknya. Selanjutnya dilakukan interpretasikan terhadap sumber-sumber tersebut sehingga menghasilkan fakta-fakta sejarah. Langkah terakhir adalah merekonstruksi kembali peristiwa yang menjadi objek kajian dan kemudian menuliskannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sekilas tentang Kapal Perang *Seven Provincien*

*De Zeven Provincien* adalah kapal perang milik Pemerintah Hindia Belanda. Kapal ini diproduksi tahun 1908 dan mulai digunakan tahun 1910. Alat tempur ini dikenal sebagai *kapal hukuman*. Pada masanya, kapal ini merupakan kapal perang terbesar yang dimiliki Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Pemerintah kolonial menjadikan kapal perang ini sebagai tempat karantina bagi marinir-marinir yang indisipliner dan atau kurang cakap dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Artinya, kapal ini menjadi tempat marinir-marinir baik dari kalangan Belanda atau Eropa maupun kaum bumiputera untuk memperbaiki diri. Kecuali itu, kapal perang kebanggaan pemerintah kolonial ini juga menjadi tempat pelatihan bagi marinir-marinir bumiputera setelah mendapat pendidikan pelayaran di Sekolah Pendidikan Dasar Pelaut Bumiputera (*Kweekschool voor Inlandse Schepelingen*) di Makassar.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Lebih lanjut tentang ini lihat umpamanya dalam Mollema, *Rondom de Muiterij op De Zeven Provincien*, (Harleem, 1934), h. 103.

Pada tahun tahun 1919 dan 1920 *De Zeven Provincien* mengalami kerusakan berat yang mengharuskannya naik dok dalam waktu yang cukup lama. Kapal ini mempunyai bobot tidak kurang dari 6,530 ton, panjangnya sekitar 101, 50 meter dan lebar sekitar 17,10 meter. Kapal ini memiliki berbagai persenjataan berat, bahkan meriamnya terbesar di antara kapal-kapal yang ada di Hindia Belanda. Meskipun demikian, daya dan ketepatan menembaknya tergolong lemah lantaran panel bidiknya lemah dan sering mengalami kerusakan. Kelemahan lainnya dari kapal perang ini adalah tidak memiliki alat penangkis serangan udara dan kecepatannya pun kurang.<sup>2</sup> Namun demikian kapal ini merupakan satu-satunya kapal perang besar yang dimiliki pemerintah Hindia Belanda untuk pelayaran yang luas dan membutuhkan awak dalam jumlah yang banyak.

### Latar Belakang Pemberontakan

Pemangkasan anggaran belanja Pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang dicetuskan oleh Gubernur Jenderal de Jonge menjadi pemicu munculnya pemberontakan. Berawal dari adanya pemotongan gaji pegawai pemerintah sebesar 5 % yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 1931. Hal serupa terjadi lagi pada awal tahun 1932. Pemotongan gaji hingga 10 % ini juga berlaku bagi anggota marinir bumiputera yang mempunyai gaji jauh lebih kecil dibanding marinir-marinir Belanda. Jelang akhir tahun 1932 perekonomian pemerintah semakin terpuruk, karena itu dilakukan kembali pemotongan gaji. Kali ini pemotongan sebesar 7% untuk semua pegawai pemerintah. Jadi, dapat waktu kurang dari setahun pemerintah telah melakukan pemotongan gaji semua pegawainya baik yang berada di negeri induk maupun di daerah koloni (baca: Hindia Belanda) sebesar 17 %.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> *Ibid.*

<sup>3</sup> Dirjen Bansos, *Citra dan Perjuangan Perintis Kemerdekaan*, Seri Pemberontakan di

Tidak lama setelah pemerintah mengumumkan pemotongan gaji untuk yang ketiga kalinya, Komandan Angkatan Laut Hindia Belanda, J.F.Osten menyampaikan keberatannya. Dalam suratnya kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Osten menyebutkan bahwa marinir tidak bisa diperlakukan sama dengan pegawai sipil pemerintah. Sebab, mereka mempunyai kedudukan yang istimewa.<sup>4</sup> Nada protes juga dilontarkan oleh Menteri Pertahanan, L.N. Deckers. Dalam suratnya kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda, dengan tegas Deckers menyampaikan keberatannya dan meminta pemotongan gaji marinir untuk sementara waktu ditunda.

Terkait dengan persoalan ini surat kabar *Soera Oemoem*<sup>5</sup> yang merupakan corong organisasi pergerakan Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) di bawah pimpinan Soetomo memberitakan bahwa pada awal tahun 1933 telah dilakukan pertemuan gabungan antara marinir-marinir Indonesia dengan komandan dan marinir-marinir Belanda untuk membicarakan penurunan gaji. Dalam pertemuan tersebut marinir-marinir Indonesia dan Eropa sepakat untuk melakukan pemogokan pada keesokan harinya apabila rencana pemerintah diteruskan. Dalam jadwal, pada tanggal 2 Januari 1933 *De Seven Provincien* akan berangkat mengitari Sumatra hingga awal Maret 1933.

Dalam suasana tegang tiba-tiba datang berita dari Osten yang menegaskan bahwa sementara menunggu pembicaraan antara pemerintah Hindia Belanda dengan pemerintah Nederland maka pemotongan gaji dari 10 % menjadi 17% ditunda dulu. Artinya gaji 1 Januari 1933 masih tetap dipotong 10%.

atas Kapal Hr.Ms. *De Zeven Provincien*, (Jakarta: Dirjen Bansos, 1980), h. 21.

<sup>4</sup> J.C.H. Blom dan Touwen Bouwsma, *Ketika Kelas Indonesia Berontak 1933*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2015), h. 2

<sup>5</sup> *Soera Oemoem*, No. 2, 2 Januari 1933.

Bagi para awak kapal berita ini sungguh menggembirakan, bahkan mereka menyangka tidak akan ada lagi penurunan gaji. Karena itu pada tanggal 2 Januari kapal dapat meninggalkan pelabuhan Surabaya tanpa insiden apa-apa. Apa yang terjadi kemudian? Berita telepon dari Osten ternyata hanya obat penenang untuk sementara waktu, sedangkan pimpinan Angkatan Laut di Surabaya, Scalongne mengatakan bahwa penurunan gaji pasti ada hanya kapan tepatnya ia tidak tahu. Berita yang simpang siur menambah keruwetan.

Sementara itu Menteri Jajahan dan Menteri Pertahanan di Negeri Belanda melakukan perundingan dan hasilnya ialah: gaji marinir Eropa di Hindia akan dipotong jadi 4 % sedangkan potongan untuk perwira dengan masa dinas lebih dari 10 tahun dikenakan potongan 7 %. Keputusan ini dituangkan dalam *Koninklijk Besluit No. 51* tanggal 21 Januari 1933 dan berlaku sejak 1 Februari 1933. Peraturan gaji untuk awak kapal Indonesia akan diatur kemudian. Ternyata pemotongan gaji untuk para awak Indonesia lebih berat lagi yaitu disamaratakan 17%, sedang Angkatan Laut Belanda hanya 14 %. Para awak kapal baru mendengar keputusan ini tanggal 26 Januari 1933. Dua hari kemudian mereka mengadakan rapat dengan dalih halal bihalal di bioskop Sabang untuk mengelabui polisi karena sebenarnya pertemuan itu dilakukan untuk menentukan langkah mereka selanjutnya.<sup>6</sup>

Suasana bertambah panas dengan adanya berita penangkapan dan penawanan 425 anak kapal Indonesia di Surabaya, lagi pula gaji awak kapal Indonesia diturunkan lebih banyak dari awak kapal Belanda. Keadaan yang tegang terus menerus akhirnya berubah menjadi suatu pemberontakan atau

<sup>6</sup> "Karena Seven Proviencien dan Ordonansi Golongan Belanda Tjemas dan Beraksi" dalam *Medan Ra'jat*, No. 5, 10 Februari 1933, h. 1 dan Dirjen Bansos, *Citra dan Perjuangan.....*, h. 35.

pengganti alihan kekuasaan terhadap kapal perang oleh awak kapal pada tanggal 4 Februari 1933.<sup>7</sup>

### Jalannya Pemberontakan

Pada tanggal 2 Januari 1933 *De Zeven Provinciën* memulai pelayarannya dari Surabaya menuju Sumatera. Awak kapal berjumlah 397 orang yang terdiri dari 141 marinir Eropa dan 256 marinir bumiputera. Selain untuk unjuk kekuatan perjalanan kapal perang ini juga sebagai sarana pelatihan bagi siswa-siswa Pendidikan Dasar Pelaut Bumiputera (*Kweekschool voor Inlandse Schepelingen*) yang berjumlah sekitar 80 orang.<sup>8</sup> Setelah menempuh perjalanan tidak kurang dari sebulan pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 1933 *De Zeven Provinciën* tiba di Banda Aceh. Tidak ada masalah berarti selama perjalanan; suasana di kapal sangat kondusif. Komandan kapal ini sangat profesional, baik, ramah dan dekat dengan bawahannya.

Sementara itu, di Surabaya terjadi pemogokan dan unjuk rasa marinir bumiputera yang bekerja di kapal-kapal pemerintah. Peristiwa ini merupakan reaksi dari keluarnya keputusan pemerintah tentang penurunan gaji marinir. Mulanya tidak banyak marinir di Kapal *De Zeven Provinciën* yang tahu tentang hal ini. Karena itu suasana di kapal perang tersebut tetap kondusif. Kejadian di Surabaya berlangsung saat *De Zeven Provinciën* masih dalam perjalanan ke tempat tujuan. Dalam waktu yang tidak begitu lama, berita tentang pemogokan dan unjuk rasa di Surabaya sampai ke telinga marinir-marinir bumiputera. Sejak itu, muncullah pemikiran-pemikiran di kalangan sekelompok kecil marinir bumiputera untuk melakukan pemogokan sebagai bentuk protes

terhadap kebijakan pemerintah yang menurunkan gaji mereka. Akan tetapi, usaha pemogokan tidak berhasil. Hal ini memicu ketegangan di kapal. Sejak itu, komandan kapal bersama perwira-perwiranya meningkatkan kewaspadaan dan memperketat pengawasan.

Meskipun berbagai berita media menyebutkan, bahwa hingga saat itu situasi di kapal perang *De Zeven Provinciën* aman dan terkendali, namun Osten tetap saja cemas dan khawatir. Beberapa hari jelang ketibaan *De Zeven Provinciën*, Osten mengirim pesan kepada Komandan *De Zeven Provinciën* agar meningkatkan kewaspadaan dan menjaga agar kapal tetap kondusif.<sup>9</sup> Sejak itu, ruang radio diperketat penjagannya.<sup>10</sup> Meskipun ketegangan dirasakan semakin meningkat, namun komandan kapal menganggap situasi masih aman dan terkendali. Karena itu, tindakan lebih jauh tidak dilakukan.

Jelang ketibaan *De Zeven Provinciën* di tempat tujuan, berita-berita tentang pemogokan di Surabaya semakin menyebar di kalangan sekelompok kecil marinir-marinir bumiputera. Kegagalan untuk melakukan pemogokan di kapal memicu mereka untuk mengambil alih kapal dan membawanya kembali ke Surabaya. Usaha pemberontakan ini dilakukan sebagai bentuk solidaritas dan dukungan terhadap aksi-aksi marinir bumiputera di Surabaya yang melakukan pemogokan kerja. Ketegangan semakin memuncak dengan santernya berita-berita media yang menyebutkan kapal *De Zeven Provinciën* aman dan terkendali; tidak ada gejolak yang berarti karena semuanya dapat diatasi. Berita ini semakin memicu kemarahan sekelompok kecil marinir bumiputera. Keinginan untuk memberontak tinggal menunggu waktu. Bagi mereka keputusan pemerintah yang menurunkan gaji marinir tidak dapat ditolerir.

<sup>7</sup> "Karena Seven Proviencien dan Ordonansi Golongan Belanda Tjemas dan Beraksi" dalam *Medan Ra'jat*, No. 5, 10 Februari 1933, h. 3.

<sup>8</sup> Blom dan Bouwsma, *Ketika Kelasi...*, h. 10.

<sup>9</sup> Mollema, *Rondom...*, h. 118.

<sup>10</sup> Blom dan Bouwsma, *Ketika Kelasi...*, h. 13.

Sehari setelah *De Zeven Provinciën* berada di Aceh, berita tentang akan adanya pemberontakan diketahui oleh beberapa perwira yang kemudian menyampaikan kepada komandan kapal yang ketika itu sedang berada di darat. Akan tetapi, komandan kapal tidak percaya sepenuhnya. Namun, untuk memastikannya malam sebelum terjadi pemberontakan komandan kapal mengutus seorang perwira untuk menyampaikan berita tersebut kepada perwira yang bertanggungjawab terhadap keselamatan kapal.

Sebelum utusan komandan kapal tiba, sekelompok kecil marinir bumiputera menjalankan aksinya di bawah pimpinan Paridja dan Kawilarang. Mereka berhasil menguasai tempat-tempat penyimpanan amunisi dan menahan beberapa perwira kapal. Sementara itu, Fels selaku penanggungjawab kapal melarikan diri ke darat. Untuk beberapa saat *De Zeven Provinciën* dalam keadaan tanpa pimpinan. Hingga tampilnya van Boven mengambil alih komando.<sup>11</sup> Pemberontakan dan upaya pengambil alihan kapal ini terjadi pada tanggal 4 Februari 1933 jelang pergantian hari. Saat kejadian, sebagian besar awak kapal sedang berada di darat. Hanya beberapa perwira saja yang tinggal di kapal.<sup>12</sup> Pada mulanya, sebagaimana yang dilaporkan oleh penguasa setempat, pemberontakan dilakukan oleh marinir-marinir bumiputera (baca :Indonesia).<sup>13</sup> Akan tetapi, ternyata tidak sedikit pula marinir-marinir Eropa khususnya Belanda yang kemudian ikut bergabung.<sup>14</sup>

<sup>11</sup> Blom dan Bouwsma, *Ketika Kelasi....*, h. 16.

<sup>12</sup> Mollema, *Rondom....*, h. 124-125. Lihat juga Blom dan Bouwsma, *Ketika Kelas....*, h. 14.

<sup>13</sup> "Pemberontakan pada Marine", *Medan Ra'jat*, No. 5, 10 Februari 1933, h. 5.

<sup>14</sup> "Keriboetan pada kapal perang Zeven Provinciën", *Tjaja Soematra*, No. 31, 8 Februari 1933.

Atas kejadian itu, Colijn Menteri Urusan Jajahan memutuskan untuk mengambil tindakan tegas terhadap marinir-marinir yang memberontak. Tidak lama setelah kejadian ia langsung mengeluarkan perintah untuk menumpas pemberontakan bahkan kalau perlu kapal perang yang membawa senjata berupa meriam 28 cm sebanyak dua buah, 4 buah meriam 15 cm, dan beberapa meriam 7 cm ini ditenggelamkan dengan torpedo.<sup>15</sup> Selain itu, Colijn juga mengeluarkan perintah yang berisi larangan bagi semua media pers untuk memberitakan kejadian tersebut. Akan tetapi, kenyataannya berita pembajakan itu dalam waktu yang tidak begitu lama cepat tersebar.

*Tjaja Soematra*, koran yang terbit di Kota Padang memberitakan bahwa saat kejadian di atas kapal perang pemerintah kolonial Hindia Belanda itu terdapat 16 Officer yakni 9 Belanda dan 3 Indonesia selebihnya bangsa asing lainnya dan 44 korpooral Belanda dan Indonesia dan 184 marinir Indonesia. *Tjaja Soematra* memberitakan : "Waktoe pemberontakan terdjadi, 2 orang officier melompat ke dalam sekotji motor jang telah diboeat roesak sehingga terpaksa officier-officier itoe mendajoeng dan dalam tempo 2 setengah djam baharoe mereka itoe sampai kedaratan."<sup>16</sup> Kedua orang inilah yang melaporkan adanya pembajakan kepada keamanan setempat.

Pemberontakan ini dilakukan sebagai protes atas pemotongan gaji yang tidak adil dan sebagai pembebasan awak kapal Indonesia yang dipenjarakan di Surabaya. Peristiwa ini tidak ada kaitannya gerakan politik. Apalagi gerakan komunis yang sering disangkakan oleh pejabat pemerintah. Sehubungan dengan ini, *Tjaja*

<sup>15</sup> "Pemberontakan pada Marine", *Medan Ra'jat*, No. 5, 10 Februari 1933, h. 5.

<sup>16</sup> "Pemberontakan pada Marine", *Medan Ra'jat*, No. 5, 10 Februari 1933, h. 5.

*Soematra* memuat isi kawat yang dikirim pemberontakan kepada pemerintah di Aceh tentang tujuan pemberontakan. *Tjaja Soematra* menulis "...diharap diberitahoean kepada autoriteit2 sekali kali kami tidak mempoenjai maksoed communist, tidak hendak melakoekan kekerasan hanja goena meprotest pemotongan gadji dan penangkapan orang2 marine disebabkan memprotes. Diatas kapal keadaan baik. Tidak ada jang loeka. mendjalankan dienst seperti biasa".<sup>17</sup>

Surat Kabar *Pandji Timoert* juga ikut memberitakan peristiwa yang menggemparkan Hindia Belanda. Surat kabar ini menyebutkan bahwa kapal perang Pemerintah itu dikuasai sepenuhnya oleh marinir-marinir bumiputera dan akan dibawa kembali ke Surabaya. Akan tetapi menurut *Pandji Timoer* komando kapal akan diserahkan kembali kepada Komandan Kapal De Zeven Privincien sehari sebelum kapal tiba di Surabaya. Pemberontakan tersebut dilakukan sebagai protes atas kebijakan pemerintah yang melakukan pemotongan gaji. Para pemberontak juga meminta pemerintah membebaskan rekan-rekan mereka yang ditangkap terkait aksi-aksi pemogokan di Surabaya.<sup>18</sup>

Seminggu setelah pemberontakan surat kabar *Soeara Soerabaja* yang terbit di Surabaya memberitakan peristiwa itu. Koran ini mengkritisi media pers yang memberitakan kejadian-kejadian di kapal *De Zeven Provincien* tanpa menyebutkan penyebab munculnya peristiwa. Koran ini juga mengkritisi Gubernur Jendral de Jonge yang mengaitkan peristiwa itu dengan kegiatan politik. Menurut *Soara Soerabaja*, de Jonge tidak mengerti persoalan karena beranggapan para

pemberontak berada di bawah pengaruh gerakan nasional. Masih menurut *Soeara Soerabaja*, keinginan untuk memperbaiki ekonomi merupakan pemicu munculnya pemberontakan. Karena itu, *Soeara Soerabaja* sangat menyesalkan media-media pers yang tidak menjelaskan hal ini. Padahal, rakyat khususnya penduduk bumiputera perlu mengetahui hal tersebut.<sup>19</sup>

Santernya berita-berita tentang pembajakan tersebut pada gilirannya, mendorong pemerintah mengambil tindakan keras. Sidang *volksraad* menyetujui usul Colijn untuk membom kapal tersebut. Akan tetapi sebelum dilakukan pengeboman terlebih dahulu dihimbau kepada pemberontakan untuk menyerahkan diri. Demikianlah, pada hari Jum'at tanggal 10 Februari 1933 komandan kapal yang dibajak itu, mencoba menghubungi para pemberontak dan meminta mereka supaya menyerahkan diri dan kalau tidak mau akan dilakukan tindakan kekerasan. Selain itu diminta juga pada para pemberontak supaya menaikkan bendera dari kain putih setengah tiang. Para pemberontak diberi kesempatan selama 10 menit. Namun para pemberontak tetap pada pendiriannya, tidak mau menyerah. Akhirnya kapal perang itu dijatuhi bom seberat 50 kg dari ketinggian 1.200 meter. Bom itu jatuh tepat di anjungan dan meledak. Akibatnya, menimbulkan kerusakan yang sangat parah. Selain itu, tidak kurang dari 3 marinir Eropa dan 16 marinir bumiputera termasuk Paradja tewas. Setidaknya, 25 yang mengalami luka-luka 11 di antaranya luka berat; 3 marinir Eropa dan 8 marinir bumiputera.<sup>20</sup>

Setelah peristiwa yang menggemparkan Hindia Belanda itu, *De Zeven Provincien* masih dapat berlayar hingga ke Onrust (Kepulauan Seribu).

<sup>17</sup> "Keriboetan pada kapal Seven Provincien", *Tjaja Soematra*, No. 32, 9 Februari 1933.

<sup>18</sup> "Pemberontakan dalam Kapal Perang De Zeven Provincien.", *Pandji Timoer*, 8 Februari 1933.

<sup>19</sup> "Rassenwaan", *Soeara Soerabaja*, 11 Februari 1933.

<sup>20</sup> Ingelson, *Jalan ke Pengasingan Pergerakan Nasional Indonesia 1927-1934*, (Jakarta: LP3ES, 1983), h. 234.

Para tahanan diturunkan di sini dan dimasukkan ke dalam tahanan sebelum diajukan ke mahkamah. Semua pemberontak kemudian diajukan ke pengadilan. Hukuman mereka 1,5 sampai 18 tahun penjara. Kawilarang, selaku pemimpin pemberontakan mendapat hukuman yang paling berat.<sup>21</sup> Komandan dan perwira tinggi yang terlibat langsung dalam peristiwa diadili di Negri Belanda, sedangkan 16 perwira lainnya diadili di Hindia Belanda.<sup>22</sup>

Penting dikemukakan bahwa walaupun marinir-marinir bumiputera yang terlibat dalam pemberontakan kemudian mengaku mengagumi pemimpin-pemimpin pergerakan seperti Soekarno dan Soetomo tetapi mereka menegaskan bahwa pemberontakan itu sama sekali tidak dipengaruhi apalagi dicampuri dan dikendalikan oleh sesuatu partai politik.<sup>23</sup> Bagaimanapun juga, peristiwa pemberontakan yang telah menggegerkan iklim pergerakan nasional itu membawa dampak yang sangat besar bagi pergerakan kemerdekaan Indonesia. Bagi pemerintah, apapun motifnya kerusuhan dan pemberontakan itu telah menjadi katalisator yang akhirnya meyakinkan Gubernur Jendral Hindia Belanda, De Jonge perlu segera diambil tindakan keras terhadap gerakan-gerakan perlawanan terhadap pemerintah.

## PENUTUP

Pemberontakan marinir-marinir bumiputera di kapal Perang De Zeven Provincien pada tahun 1933 merupakan gerakan protes sosial. Gerakan ini dipicu oleh kebijakan pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang mengurangi gaji marinir dan pegawai

pemerintah lainnya sebanyak 17 %. Pengurangan gaji marinir bumiputera pun ternyata lebih besar dari gaji marinir Eropa. Meskipun gerakan ini bebas dari pengaruh politik karena semata-mata memang perjuangan ekonomi untuk memperbaiki kehidupan, namun bagaimanapun juga gerakan tersebut merupakan efek dari bangkitnya kesadaran kebangsaan kaum bumiputera. Peristiwa yang menggemparkan Hindia Belanda ini, sesungguhnya menunjukkan arti penting persatuan dan kekuatan dalam memperjuangkan keadilan sosial. Para pemberontak itu, terdiri dari berbagai suku bangsa dan penganut agama yang berbeda, tetapi mereka bersatu dalam mewujudkan nasionalisme Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

Blom, J.C.H., dan Touwen Bouwsma, *Ketika Kelasi Indonesia Berontak 1933*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2015

<sup>21</sup> Mollema, *Random...*, h. 204-205.

<sup>22</sup> Blom dan Bouwsma, *Ketika Kelasi...*, h. 31-32.

<sup>23</sup> Dirjen Depsos, *Citra dan Perjuangan.....*,h., 14; John Ingelson, *Jalan ke Pengasingan.....*, h. 234.

- Dirjen Bansos, *Citra dan Perjuangan Perintis Kemerdekaan*, Seri Pemberontakan di Atas
- Dirjen Depsos, *Citra dan Perjuangan....*,h., 14; John Ingelson, *Jalan ke Pengasingan.....*, h. 234.
- "Karena Seven Proviencien dan Ordonansi Golongan Belanda Tjemas dan Beraksi" dalam *Medan Ra'jat*, No. 5, 10 Februari 1933
- Kapal Hr.Ms. *De Zeven Provinciën*, Jakarta: Dirjen Bansos, 1980
- "Keriboetan pada kapal Seven Proviencien", *Tjaja Soematra*, No. 32, 9 Februari 1933.
- "Keriboetan pada kapal perang Zeven Proviencien", *Tjaja Soematra*, No. 31, 8 Februari 1933.
- Mollema, *Rondom de Mouterij op De Zeven Provinciën*, Harleem, 1934
- Soera Oemoem*, No. 2, 2 Januari 1933.
- "Pemberontakan pada Marine", *Medan Ra'jat*, No. 5, 10 Februari 1933, h. 5.
- "Pemberontakan pada Marine", *Medan Ra'jat*, No. 5, 10 Februari 1933, h. 5.
- "Pemberontakan pada Marine", *Medan Ra'jat*, No. 5, 10 Februari 1933, h. 5.
- "Pemberontakan dalam Kapal Perang *De Zeven Provinciën*:", *Pandji Timoer*, 8 Februari 1933.
- "Rassenwaan", *Soera Soerabaja*, 11 Februari 1933.
- Ingelson, *Jalan ke Pengasingan Pergerakan Nasional Indonesia 1927-1934*, Jakarta: LP3ES, 1983
- Blom, J.C.H., dan Touwen Bouwsma, *Ketika Kelasi Indonesia Berontak 1933*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2015
- Dirjen Bansos, *Citra dan Perjuangan Perintis Kemerdekaan*, Seri Pemberontakan di Atas
- Dirjen Depsos, *Citra dan Perjuangan....*,h., 14; John Ingelson, *Jalan ke Pengasingan.....*, h. 234.
- "Karena Seven Proviencien dan Ordonansi Golongan Belanda Tjemas dan Beraksi" dalam *Medan Ra'jat*, No. 5, 10 Februari 1933
- Kapal Hr.Ms. *De Zeven Provinciën*, Jakarta: Dirjen Bansos, 1980
- "Keriboetan pada kapal Seven Proviencien", *Tjaja Soematra*, No. 32, 9 Februari 1933.
- "Keriboetan pada kapal perang Zeven Proviencien", *Tjaja Soematra*, No. 31, 8 Februari 1933.
- Mollema, *Rondom de Mouterij op De Zeven Provinciën*, Harleem, 1934
- Soera Oemoem*, No. 2, 2 Januari 1933.
- "Pemberontakan pada Marine", *Medan Ra'jat*, No. 5, 10 Februari 1933, h. 5.
- "Pemberontakan pada Marine", *Medan Ra'jat*, No. 5, 10 Februari 1933, h. 5.

“Pemberontakan pada Marine”, *Medan Ra'jat*, No. 5, 10 Februari 1933, h. 5.

“Pemberontakan dalam Kapal Perang *De Zeven Provinciën*”, *Pandji Timoer*, 8 Februari 1933.

“Rassenwaan”, *Soera Soerabaja*, 11 Februari 1933.

Ingelson, *Jalan ke Pengasingan Pergerakan Nasional Indonesia 1927-1934*, Jakarta: LP3ES, 1983

Blom, J.C.H., dan Touwen Bouwsma, *Ketika Kelasi Indonesia Berontak 1933*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2015

Dirjen Bansos, *Citra dan Perjuangan Perintis Kemerdekaan*, Seri Pemberontakan di Atas

Dirjen Depsos, *Citra dan Perjuangan.....*,h., 14; John Ingelson, *Jalan ke Pengasingan.....*, h. 234.

"Karena Seven Proviencien dan Ordonansi Golongan Belanda Tjemas dan Beraksi" dalam *Medan Ra'jat*, No. 5, 10 Februari 1933

Kapal Hr.Ms. *De Zeven Provinciën*, Jakarta: Dirjen Bansos, 1980

“Keriboetan pada kapal Seven Proviencien”, *Tjaja Soematra*, No. 32, 9 Februari 1933.

“Keriboetan pada kapal perang Zeven Proviencien”, *Tjaja Soematra*, No. 31, 8 Februari 1933.

Mollema, *Rondom de Mouterij op De Zeven Provinciën*, Harleem, 1934

*Soera Oemoem*, No. 2, 2 Januari 1933.

“Pemberontakan pada Marine”, *Medan Ra'jat*, No. 5, 10 Februari 1933, h. 5.

“Pemberontakan pada Marine”, *Medan Ra'jat*, No. 5, 10 Februari 1933, h. 5.

“Pemberontakan pada Marine”, *Medan Ra'jat*, No. 5, 10 Februari 1933, h. 5.

“Pemberontakan dalam Kapal Perang *De Zeven Provinciën*”, *Pandji Timoer*, 8 Februari 1933.

“Rassenwaan”, *Soera Soerabaja*, 11 Februari 1933.

Ingelson, *Jalan ke Pengasingan Pergerakan Nasional Indonesia 1927-1934*, Jakarta: LP3ES, 1983

Blom, J.C.H., dan Touwen Bouwsma, *Ketika Kelasi Indonesia Berontak 1933*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2015

Dirjen Bansos, *Citra dan Perjuangan Perintis Kemerdekaan*, Seri Pemberontakan di Atas

Dirjen Depsos, *Citra dan Perjuangan.....*,h., 14; John Ingelson, *Jalan ke Pengasingan.....*, h. 234.

"Karena Seven Proviencien dan Ordonansi Golongan Belanda Tjemas dan Beraksi" dalam *Medan Ra'jat*, No. 5, 10 Februari 1933

Kapal Hr.Ms. *De Zeven Provinciën*, Jakarta: Dirjen Bansos, 1980

“Keriboetan pada kapal Seven Proviencien”, *Tjaja Soematra*, No. 32, 9 Februari 1933.

“Keriboetan pada kapal perang Zeven Provincien”, *Tjaja Soematra*, No. 31, 8 Februari 1933.

Mollema, *Rondom de Muiterij op De Zeven Provincien*, Harleem, 1934

*Soera Oemoem*, No. 2, 2 Januari 1933.

“Pemberontakan pada Marine”, *Medan Ra'jat*, No. 5, 10 Februari 1933, h. 5.

“Pemberontakan pada Marine”, *Medan Ra'jat*, No. 5, 10 Februari 1933, h. 5.

“Pemberontakan pada Marine”, *Medan Ra'jat*, No. 5, 10 Februari 1933, h. 5.

“Pemberontakan dalam Kapal Perang *De Zeven Provincien.*, *Pandji Timoer*, 8 Februari 1933.

“Rassenwaan”, *Soeara Soerabaja*, 11 Februari 1933.

Ingelson, *Jalan ke Pengasingan Pergerakan Nasional Indonesia 1927-1934*, Jakarta: LP3ES, 1983

